

# Buku Panduan Review Program





# Buku Panduan Review Program

## Buku Panduan Review Program

Copyright© 2023 Yayasan Tifa dan Japan Initiative

---

### Penulis

Nurma Fitrianingrum  
Titok Hariyanto  
Taki Kitada

### Editor

Muhammad Daniel Fahmi Rizal

### Perancang Grafis

Cipsi Studio

### Diterbitkan oleh

Yayasan Tifa  
18 Office Park, 15th floor, Unit C-D  
Jl. TB Simatupang No.18 Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12520

---



# Pengantar dari Yayasan Tifa

Jakarta, Juli 2023

**Oslan Purba**

**Direktur Eksekutif Yayasan Tifa**

Selamat datang di buku panduan ini! Yayasan Tifa, yang telah berdiri sejak tahun 2000, memiliki visi luhur untuk mendorong terwujudnya masyarakat terbuka yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebhinnekaan, kesetaraan, dan keadilan. Kami percaya bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci penting bukan hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demi mewujudkan visi tersebut, kami bekerja sama dengan Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia menjalankan *Review Program* (sebelumnya *Review Program*) sejak tahun 2021. *Review Program* merupakan pendekatan yang inovatif dalam mengevaluasi program atau kegiatan pemerintah secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengambil keputusan. Melalui dialog dan kolaborasi dalam proses *Review Program* ini, masyarakat dapat mengenal program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, serta secara langsung menilai apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan, perlu ditingkatkan, atau bahkan harus dihentikan.

Kami sangat mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang atas dukungannya dalam memperkenalkan *Review Program* di Indonesia. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Joko Purnomo, serta seluruh pihak di Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan *Review Program* di wilayah ini. Penghargaan kami juga kepada Panitia Pelaksana *Review Program* di Kabupaten, yaitu BAPPEDA, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemda Bantul, dan Inspektorat, yang telah bekerja aktif untuk memastikan keberhasilan kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo yang telah berpartisipasi aktif dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan *Review Program* di wilayah masing-masing. Tidak

lupa kami berterima kasih kepada Atmawidya Alterasi Indonesia yang telah memberikan pendampingan berharga selama program ini berlangsung.

Buku panduan ini merupakan hasil dari pembelajaran yang berharga selama dua tahun terakhir dalam pelaksanaan Review Program di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo, serta di Kabupaten Bantul, D.I.Y. Yogyakarta. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat. Melalui evaluasi program pembangunan yang transparan dan terbuka dapat diwujudkan akuntabilitas langsung pada masyarakat. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mengarahkan pembangunan yang lebih berarti dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

Akhir kata, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini. Selamat membaca!

# Pengantar dari Japan Initiative

**Tokyo, Juli 2023**

**Hideki Kato**

**Presiden Japan Initiative**

Japan Initiative merupakan sebuah organisasi think tank yang bertujuan untuk mewujudkan bentuk demokrasi yang sehat. Japan Initiative telah merancang dan menerapkan sistem yang menyediakan ruang di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan atas inisiatif mereka sendiri. *Review Program* telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan banyak pemerintah daerah selama lebih dari 20 tahun ini, serta telah dikenal banyak orang di Jepang. Metode ini senantiasa berkembang dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin meningkat.

Buku panduan ini mengandung esensi dari apa yang telah kami pelajari melalui diskusi di antara Japan Initiative, Yayasan Tifa, dan Perkumpulan Atmawidya Alterasi Indonesia, serta banyak pemangku kepentingan di Indonesia serta berdasarkan pengalaman mempraktikkannya selama ini.

Selain nasihat yang berharga, buku ini dikemas berdasarkan keberhasilan dan kegagalan yang dihasilkan dari praktik di lapangan. Itu menunjukkan cara unik dan sangat menarik dalam pelaksanaan *Review Program* di Indonesia, yang berbeda dari Jepang. Atas semangat dari setiap orang di Indonesia, Japan Initiative sangat terkesan dan menghormati keberhasilan pelaksanaan *Review Program* di sini.



Tentu saja, metode yang ditampilkan di sini bukan satu-satunya jawaban yang benar. Hal tersebut didasari jumlah sampel dan pengalaman yang tidak bisa dikatakan banyak. Kami berharap buku panduan ini akan membantu Anda untuk menemukan metode yang paling sesuai dan menciptakan bentuk baru partisipasi masyarakat di setiap tempat. Inilah yang menurut kami paling signifikan.

Bersama masyarakat, mari kita sebarkan demokrasi yang sehat di dunia!

# Daftar Isi

---

	Pengantar dari Yayasan Tifa	vi
	Pengantar dari Japan Initiative	viii

---

<b>01</b>	1.1 Pendahuluan	01
	1.2 Evaluasi Program	02
	1.3 Mengapa Menggunakan Review Program?	04
	1.4 Program atau Kegiatan	05
	1.5 Pemilihan Program/Kegiatan untuk Dievaluasi	05
	1.6 Kapan Review Program Dilaksanakan?	06
	1.7 Berapa Program yang Dapat Dievaluasi?	07

---

<b>02</b>	2.1 Unsur Penyelenggaraan Review Program	09
	2.2 Instrumen Review Program	13

---

<b>03</b>	3.1 Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Review Program	17
	3.2 Persiapan Teknis dan Tata Letak Review Program	24

---

---

<b>04</b>	Alur Pelaksanaan Review Program	29
-----------	---------------------------------	----

---

<b>05</b>	5.1 Tindak Lanjut Pasca-Review Program	41
	5.2 Cerita Perubahan	42

---

<b>06</b>	Pembiayaan Review Program	47
-----------	---------------------------	----

---

<b>07</b>	7.1 Review Program di Tingkat Desa dan Kabupaten	49
	7.2 Pendapat Mereka Tentang Review Program	56
	7.3 Daftar Singkatan	58

---

# Bagian

# 01



## 1.1 Pendahuluan

Buku panduan ini ditujukan bagi mereka yang berencana untuk melakukan evaluasi program atau kegiatan, serta mereka yang tertarik dengan metode baru dalam melakukan evaluasi program yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Panduan ini tepat bagi kalangan pemerintah seperti pemerintah tingkat desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi yang tertarik untuk mengevaluasi program, kegiatan, atau subkegiatan dalam program kerja mereka. Meski demikian, kelompok lain seperti organisasi masyarakat sipil atau warga aktif dapat pula mempelajari metode ini dan mengembangkannya untuk mengevaluasi program atau kegiatan mereka dengan lebih partisipatif.

Buku panduan ini disusun berdasarkan hasil, pengalaman, dan pembelajaran dari uji coba Review Program pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, Yayasan Tifa, Japan Initiative, dan Atmawidya Alterasi Indonesia bermitra dengan Pemerintah Kalurahan<sup>1</sup> Guwosari dan Kalurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul untuk melakukan uji coba Review Program di tingkat desa. Di tahun 2023, kami juga bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan uji coba Review Program di tingkat kabupaten. Di samping itu, pada tahun 2023, pendampingan juga dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska)<sup>2</sup> dan Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo untuk menyelenggarakan Review Program.

Buku panduan ini juga mengambil referensi dari pengalaman praktik Review Program di negeri asalnya, Jepang, yang telah berlangsung selama 20 tahun. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai asal-usul Review Program maupun bagaimana praktiknya di Jepang selama ini, Anda dapat membaca buku kami yang diterbitkan pada tahun 2021 yang berjudul *Program Review, Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat*.

---

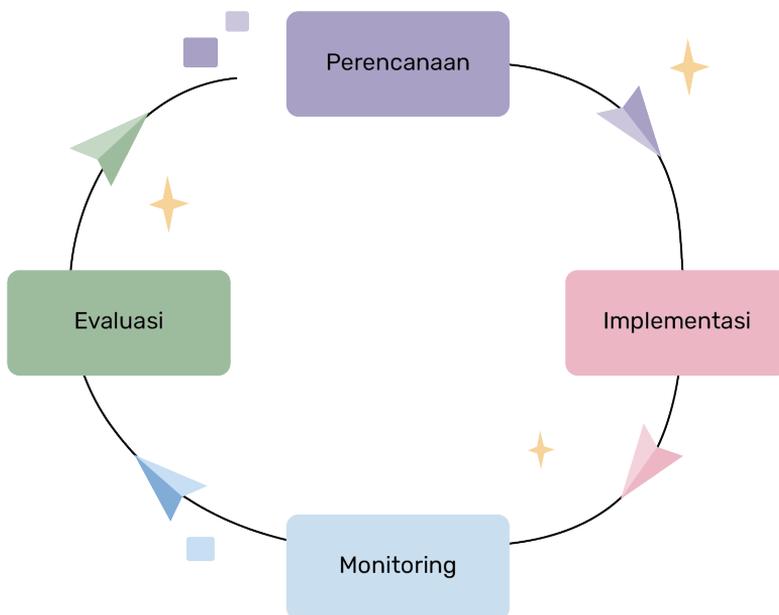
1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Kalurahan.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan

## 1.2 Evaluasi Program

Siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan pemerintah biasanya dimulai dari tahap perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan diakhiri dengan evaluasi. Penentuan atau perumusan program dilakukan pada tahap perencanaan. Pada fase ini, program diturunkan menjadi sejumlah kegiatan-kegiatan dengan target output yang lebih riil (*tangible*). Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut diimplementasikan, baik secara langsung oleh pemerintah atau dapat pula melalui pihak ketiga.

Selama proses implementasi, pemerintah dan atau pihak yang ditunjuk melaksanakan monitoring untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan. Setelah berakhirnya implementasi, selanjutnya dilaksanakan evaluasi atas eksekusi kegiatan-kegiatan tersebut dan pencapaian terhadap target program secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan bahwa pembangunan sebagai suatu siklus, idealnya pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk merumuskan rencana baru dan siklus berlanjut ke implementasi.



Siklus pembangunan secara sederhana

Siklus yang telah dijelaskan dan digambarkan tersebut merupakan model yang paling sederhana. Dalam perkembangannya, model tersebut terus berkembang dengan modifikasi-modifikasi di tiap prosesnya yang bertujuan meningkatkan efektivitas program dan kegiatan.

Di Indonesia, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara cukup komprehensif dan melalui mekanisme yang relatif partisipatif. Setiap tahunnya pemerintah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan tujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang mencerminkan aspirasi masyarakat (*bottom-up*) dan lebih inklusif. Digelarnya Musrenbang sebagai agenda tahunan yang melibatkan masyarakat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merencanakan program pembangunan.

Sayangnya, berbanding terbalik dengan tahap perencanaan, tahap evaluasi seringkali belum dilakukan secara serius maupun melibatkan partisipasi masyarakat seperti pada tahap perencanaan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah masih cenderung administratif dan teknokratis. Tentu beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat sipil telah menginisiasi pendekatan evaluasi pembangunan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat terutama *beneficiaries* (penerima manfaat) secara langsung. Namun, ini belum menjadi praktik yang umum.

Review Program hadir sebagai salah satu pilihan pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Selain itu, Review Program juga merupakan pendekatan yang menawarkan efisiensi karena dapat dilakukan secara sederhana.

## 1.3 Mengapa Menggunakan Review Program?

Terdapat banyak pendekatan untuk melaksanakan evaluasi program-program pemerintah, baik yang dikembangkan oleh pemerintah sendiri, lembaga independen, atau yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil. Masing-masing pendekatan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, satu metode mungkin lebih sesuai diterapkan untuk suatu konteks dibandingkan metode yang lain. Lalu, mengapa menggunakan pendekatan Review Program ini?

- Review Program menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan. Beberapa pendekatan evaluasi yang dikembangkan seringkali sebatas menempatkan masyarakat sebagai sumber data atau informan. Masyarakat tidak memiliki suara untuk mengambil keputusan. Dengan Review Program, masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai penentu atau hakim atas program yang dievaluasi.
- Review Program meninjau capaian riil program, bukan sebatas pada aspek administratif teknokratis. Selama ini, seringkali birokrat terjebak pada pendekatan evaluasi yang berfokus pada aspek-aspek administrasi, tetapi justru melewatkan unsur-unsur substansial yang mempengaruhi capaian program terutama yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat dan efektivitas program. Dengan pendekatan Review Program ini, maka akan dihasilkan masukan-masukan langsung dari masyarakat maupun evaluator yang lebih kritis dan membangun untuk perbaikan program/kegiatan.
- Review Program sudah diimplementasikan di Jepang selama dua dekade dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi di Jepang. Berdasarkan catatan dari Japan Initiative, beberapa capaian yang telah diraih antara lain: *Pertama*, dengan Review Program, pemerintah daerah di Jepang dapat menghemat sekitar 10 persen anggaran belanjanya, sementara di tingkat pemerintah pusat dapat dihemat sekitar 160 miliar Yen per tahunnya. *Kedua*, berdasarkan hasil Review Program selama beberapa tahun berjalan, berbagai pemerintah daerah di Jepang berhasil menghapus sekitar 1.815 program/kegiatan dengan berbagai alasan. *Ketiga*, pengalaman menjalankan Review Program membawa perubahan pada pola pikir pegawai di mana mereka menjadi lebih kritis terhadap program, akuntabel, dan menyadari pentingnya lebih komunikatif dalam menyampaikan program kepada masyarakat.

## 1.4 Program atau Kegiatan

Meski menggunakan nama Review Program, sejatinya pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program, kegiatan, maupun subkegiatan. Selama periode uji coba, kami seringkali mendapatkan pertanyaan: Review Program harus mengevaluasi program atau bisa digunakan untuk mengevaluasi kegiatan? Sebetulnya tidak ada ketentuan baku mengenai pemilihan tingkatan aktivitas yang dievaluasi. Hal ini mengingat skala program, kegiatan, maupun subkegiatan seringkali berbeda-beda pada setiap tingkatan pemerintahan. Pendekatan ini fleksibel untuk diterapkan dalam mengevaluasi program, kegiatan, maupun subkegiatan. Dalam uji coba Review Program, baik di tingkat pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, evaluasi dilakukan untuk kegiatan dan subkegiatan karena alasan skala, kompleksitas informasi, dan kemudahan fokus diskusi.

## 1.5 Pemilihan Program/Kegiatan untuk Dievaluasi

Pemerintah dapat melaksanakan ratusan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Tentu tidak mungkin untuk mengevaluasi semua program atau kegiatan tersebut mengingat sumber daya yang terbatas. Pelaksanaan evaluasi atas seluruh program justru menjadi kontraproduktif. Oleh karenanya, pemerintah perlu memilih prioritas program atau kegiatan yang perlu dievaluasi dengan beberapa kombinasi kriteria. Kriteria untuk menentukan prioritas program/kegiatan yang dievaluasi adalah sebagai berikut.

1. Program yang rutin diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya sudah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dan cenderung menjadi rutinitas tanpa ada kajian efektivitasnya.
2. Program yang masih diselenggarakan pada saat pelaksanaan evaluasi (meski yang dievaluasi adalah implementasi tahun sebelumnya).
3. Program dengan anggaran yang besar, sementara penerima manfaatnya (*beneficiaries*) cenderung terbatas. Atau berbiaya besar, tetapi tidak mampu menciptakan perubahan yang diharapkan.

4. Program yang banyak mendapat kritikan dari masyarakat atau program yang dinilai oleh pemerintah perlu diperbaiki.
5. Program strategis pemerintah yang perlu dilihat efektivitasnya.

Kriteria-kriteria di atas digunakan bersamaan untuk memilih program maupun kegiatan yang akan dievaluasi sehingga justifikasi pemilihan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat baku dan masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan agenda pemerintah. Misalnya pemerintah daerah memiliki tujuan untuk melihat efektivitas capaian target pengentasan kemiskinan, maka kriteria pemilihan program yang akan direview dapat ditambah dengan 'program atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan'.

## 1.6 Kapan Review Program Dilaksanakan?

Review Program harus dilaksanakan setelah selesainya implementasi program/kegiatan yang dievaluasi, seringkali menyesuaikan selesainya tahun anggaran. Di Indonesia, tahun anggaran berakhir pada bulan Desember sehingga sebaiknya Review Program dilaksanakan pada bulan Februari-Mei. Berdasarkan uji coba yang kami laksanakan, idealnya Review Program di tingkat kabupaten dilaksanakan selambatnya pada bulan Maret, sedangkan untuk tingkat desa selambatnya bulan Mei. Sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Jika dibutuhkan Review Program dapat dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun anggaran, selama memang kegiatan/program sudah selesai dilaksanakan. Misalkan saja kegiatan/program sudah selesai diimplementasikan di bulan Juni atau Juli di tahun anggaran berjalan, kemudian ingin dilakukan Review Program karena alasan-alasan strategis, maka Review Program dapat dilakukan tanpa menunggu berakhirnya tahun anggaran.

## 1.7 Berapa Program yang Dapat Dievaluasi?

Dalam satu Review Program dapat dilakukan evaluasi untuk beberapa program/kegiatan. Satu sesi evaluasi program atau kegiatan memakan waktu antara 1 hingga 1,5 jam. Sehingga, dalam satu hari Review Program dapat dilaksanakan rangkaian beberapa evaluasi. Untuk efisiensi, perlu untuk dievaluasi minimal dua atau tiga kegiatan/program dalam satu Review Program. Di Jepang, bahkan dalam satu hari Review Program bisa melakukan dua rangkaian evaluasi secara bersamaan di dua ruang kelas yang berbeda, di mana dalam satu rangkaian dilakukan evaluasi untuk lima program secara paralel. Total dalam satu hari Review Program dapat dievaluasi sepuluh program.

# Bagian

# 02



## 2.1 Unsur Penyelenggaraan Review Program

Dalam pelaksanaan Review Program, terdapat lima unsur yang harus ada. Tanpa kelima unsur ini, Review Program menjadi tidak ideal.



### A. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana bertugas untuk mempersiapkan dan mengorganisasi jalannya Review Program. Jumlah Panitia Pelaksana idealnya empat sampai tujuh orang, yang ditentukan dengan memperhatikan kapasitas, beban kerja, dan struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah relasi kerja antar-instansi yang terlibat dalam Review Program. Sebagai contoh, di tingkat desa, Panitia Pelaksana Review Program dapat terdiri atas unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau gabungan BPD dan pemerintah. Ini dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi BPD sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi program-program di desa. Sementara di kabupaten, Panitia Pelaksana dapat terdiri atas unsur BAPPEDA dan instansi lain yang terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi program.

## **B. Pengampu Program**

Pengampu Program merupakan penanggung jawab program/kegiatan yang dievaluasi. Dalam Review Program, Pengampu Program bertugas untuk mempersiapkan Lembar Informasi Program, mempresentasikan program, dan menjawab pertanyaan selama jalannya Review Program. Sebaiknya yang menjadi Pengampu Program adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam implementasi program/kegiatan sehingga mengetahui kondisi riil secara langsung. Dalam Review Program, Pengampu Program yang terlibat langsung berjumlah dua sampai tiga orang. Misalnya, kepala seksi dan stafnya yang mengerjakan kegiatan/program, atau apabila di tingkat desa bisa Kepala Urusan (Kaur). Jika kegiatan dilaksanakan oleh lembaga lain seperti kader Posyandu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) maka Pengampu Program dapat pula menyertakan salah satu anggota lembaga yang terlibat dalam kegiatan. Pengampu Program juga dapat berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

## **C. Warga Penilai**

Warga Penilai merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih secara acak yang bertugas untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan program dan menentukan keberlanjutan program. Jumlah Warga Penilai sekitar 30 orang yang dipilih secara acak dari daftar penduduk. Pemilihan secara acak dilakukan untuk menjamin bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Warga Penilai. Dengan pemilihan secara acak, juga diharapkan diperoleh Warga Penilai dengan latar belakang yang beragam, baik dari aspek usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan seterusnya sehingga akan meningkatkan objektivitas dan meminimalisir bias.

## **D. Evaluator**

Evaluator pada Review Program bertugas sebagai penanggung. Meskipun disebut Evaluator, sebetulnya peran mereka bukan untuk memberikan evaluasi secara langsung, melainkan menggali dan mempertajam isu dan informasi terkait program yang dievaluasi. Isu dan informasi ini termasuk yang disampaikan Pengampu Program secara langsung maupun yang tercantum dalam Lembar Informasi Program. Evaluator terdiri atas tiga sampai empat orang. Mereka dapat berasal dari kalangan praktisi, tenaga ahli, birokrat, pengusaha, ataupun akademisi.

Evaluator harus berasal dari luar lingkungan pemerintahan dan tinggal di luar wilayah administrasi yang programnya tengah dievaluasi sehingga diharapkan mampu memberikan pertanyaan secara objektif. Apabila dalam satu hari dilaksanakan Review Program untuk beberapa kegiatan/program berbeda, maka Evaluator dapat menggunakan orang-orang yang sama. Oleh karenanya, penentuan komposisi Evaluator dapat dilakukan dengan mempertimbangkan program-program yang akan dievaluasi. Dalam menjalankan perannya, Evaluator perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik, mereka perlu untuk mencari informasi-informasi dasar tambahan, bukan hanya terkait program, tetapi juga kondisi daerah.

### **E. Moderator**

Moderator bertugas memandu jalannya diskusi dalam Review Program. Sebagaimana halnya Evaluator, Moderator juga berasal dari luar wilayah yang menyelenggarakan evaluasi sehingga diharapkan dapat memandu diskusi secara obyektif.

## Rangkuman Unsur Penyelenggaraan Review Program

No	Unsur	Tugas	Jumlah
1	Panitia Pelaksana	Mempersiapkan, mengorganisir, dan melaksanakan Review Program (untuk peran yang lebih detail silahkan merujuk pada halaman <b>34</b> ).	4-7 orang
2	Pengampu Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan Lembar Informasi Program.</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai program yang direview.</li> <li>- Menjawab pertanyaan evaluator dan Warga Penilai.</li> </ul>	2-3 orang
3	Warga Penilai	Mengambil keputusan atas program yang dievaluasi.	Sekitar 30 orang
4	Evaluator	Mendalami, mempertajam, dan menggali informasi dari Pengampu Program agar Warga Penilai dapat mengambil keputusan yang berdasarkan informasi dan data yang lengkap. Evaluator juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan mencari informasi-informasi dasar tambahan bukan hanya terkait program namun juga kondisi daerah.	3-4 orang
5	Moderator	Memandu jalannya diskusi pada Review Program.	1 orang

## 2.2 Instrumen Review Program

Terdapat tiga macam lembar yang perlu dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana untuk digunakan dalam pelaksanaan Review Program.

### A. Lembar Informasi Program

Lembar Informasi Program (LIP) merupakan form yang berisi ringkasan informasi yang terperinci mengenai program yang dievaluasi. Lembar ini berisi informasi mengenai: identitas program/kegiatan yang tengah dievaluasi, alasan dan tujuan review, ringkasan program, biaya, realisasi program, evaluasi mandiri oleh lembaga pengampu program, serta referensi atas program serupa di tempat lain jika ada. Karena keterbatasan ruang pada Lembar Informasi Program, maka dapat dilengkapi dengan lampiran untuk memuat informasi dan penjelasan tambahan yang dinilai penting namun tidak terakomodasi atau termuat di LIP. Lembar ini diisi oleh Pengampu Program.

Lembar Informasi Program akan dipublikasikan sebelum pelaksanaan Review Program. Dan pada pelaksanaan Review Program LIP dibagikan kepada setiap orang yang hadir tanpa terkecuali.



## B. Lembar Evaluasi Program

Lembar Evaluasi Program (LEP) adalah form yang digunakan oleh Warga Penilai untuk menuliskan keputusannya atas program/kegiatan yang dievaluasi, apakah perlu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Lembar Evaluasi Program terdiri atas dua bagian, pertama adalah voting atas masa depan program, dan bagian kedua adalah catatan. Bagian catatan dalam LEP dapat disesuaikan form isian nya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan review.



## C. Lembar Rekap Penilaian

Lembar rekap digunakan untuk menuliskan hasil penilaian Warga Penilai ketika penghitungan secara terbuka.





# Bagian

# 03



## 3.1 Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Review Program

Agar pelaksanaan Review Program dapat berjalan dengan baik, berbagai tahapan persiapan perlu dilakukan. Tahapan persiapan ini juga merupakan prasyarat pelaksanaan Review Program yang baik dan ideal.

### 1. Pembentukan Panitia Pelaksana

Komitmen pemerintah, baik kepala pemerintah atau dinas/badan terkait, untuk melakukan Review Program menjadi langkah awal dan aspek terpenting dalam Review Program. Di sini pemerintah atau instansi terkait yang berniat melakukan Review Program kemudian membentuk Panitia Pelaksana.

### 2. Pemilihan Program untuk Direview

Terdapat ratusan program/kegiatan di setiap instansi pemerintah. Tidak mungkin untuk meninjau seluruhnya dengan Review Program karena akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilih program/kegiatan yang akan dievaluasi secara strategis agar manfaat dari Review Program dapat dirasakan secara maksimal. Kriteria-kriteria pemilihan program atau kegiatan untuk dievaluasi dapat dilihat pada halaman **05**.



### **3. Penyusunan Lembar Informasi Program oleh Pengampu Program**

Pengampu Program mengisi Lembar Informasi Program sesuai dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam pengisian Lembar Informasi Program ini, Panitia Pelaksana perlu mendampingi dan memastikan informasi yang dituliskan sudah informatif dan juga mudah dipahami. Pengampu Program harus memilih dan menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami dalam mengisi Lembar Informasi Program. Hal ini mengingat dokumen akan dibaca oleh warga masyarakat yang tidak familiar akan istilah-istilah pembangunan dan birokrasi.

Ketersediaan data menjadi faktor yang penting dan mempercepat proses pengisian Lembar Informasi Program sehingga penting untuk Pengampu Program menyiapkan data-data terkait program/kegiatan sebelum mulai mengisi Lembar Informasi Program. Apabila diperlukan, Lembar Informasi Program dapat dilengkapi dengan lampiran yang berisi foto, gambar, dan data lain yang tidak termuat di dalam format.

### **4. Pemilihan Warga Penilai**

Panitia Pelaksana bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan Warga Penilai sejumlah sekitar 30 orang dengan metode acak dari populasi warga. Tentu tidak semua warga yang ada dalam data kependudukan kemudian menjadi kandidat Warga Penilai. Sebaiknya dilakukan pembatasan umur untuk memastikan mereka yang mengikuti Review Program dapat mengikuti dan memahami jalannya diskusi serta dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Perlu diambil batas usia minimum dan maksimum, misalnya minimum usia 17 tahun untuk program yang bersifat umum. Panitia Pelaksana dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir sebagai basis data warga yang akan diacak. Batas minimum ini dapat diturunkan apabila memang mengevaluasi program spesifik yang memerlukan keterlibatan penilai berusia anak-anak, seperti misal program untuk anak sekolah atau untuk remaja.



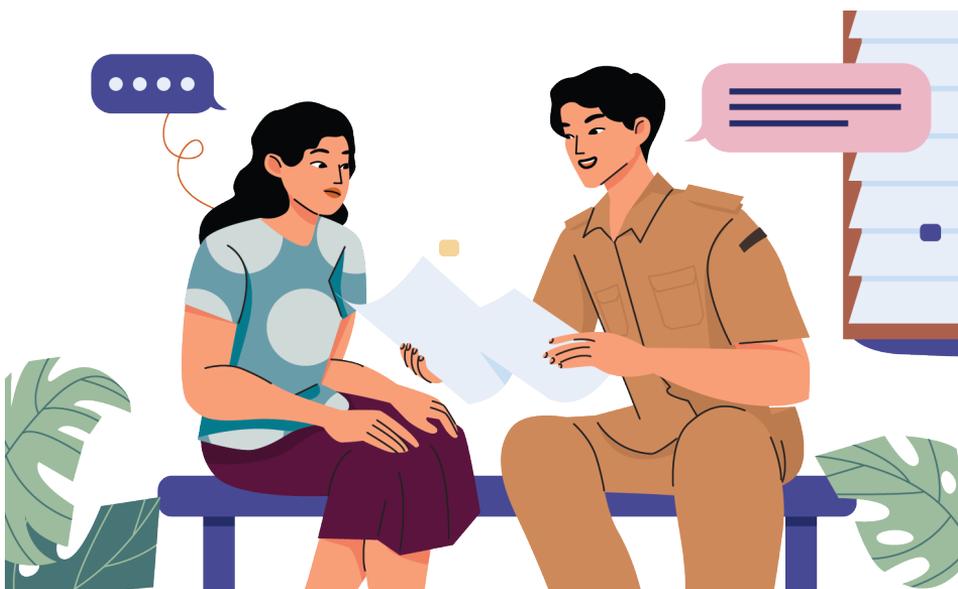
Pemilihan Warga Penilai juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling* dengan mempertimbangkan unsur-unsur khusus untuk meningkatkan inklusivitas proses evaluasi seperti: perwakilan wilayah (misal kecamatan, desa, dusun), perwakilan gender, perwakilan kelompok marginal, dan lain-lainnya selama tidak mendiskriminasi atau mengeksklusi kelompok tertentu dengan tujuan yang tidak baik. Pemilihan acak dapat dilakukan dengan menggunakan excel atau aplikasi lain.

Panitia Pelaksana perlu untuk memilih cadangan kandidat Warga Penilai sebagai antisipasi apabila ada calon Warga Penilai yang menolak berpartisipasi. Hal tersebut dikarenakan partisipasi sebagai Warga Penilai sifatnya adalah sukarela. Apabila dari 30 kandidat Warga Penilai ada yang menolak berpartisipasi maka Panitia Pelaksana harus menghubungi kandidat cadangan untuk menggantikan. Sebaiknya Panitia Pelaksana menyiapkan cadangan minimal sejumlah target Warga Penilai, artinya apabila target Warga Penilai 30 orang maka perlu ada 30 kandidat utama dan 30 kandidat cadangan.

Di tingkat desa, uji coba kami menunjukkan angka partisipasi warga yang tinggi dalam Review Program, dengan tingkat partisipasi menunjukkan lebih dari 50 persen. Namun, di tingkat kabupaten di mana wilayah geografis lebih luas secara signifikan dan secara psikologis masyarakat lebih berjarak dengan pemerintah, penolakan warga untuk berpartisipasi sebagai Warga Penilai lebih besar karena alasan jarak maupun hal lain. Maka, Panitia Pelaksana perlu untuk menyiapkan lebih banyak cadangan, misalnya dua kali lipat dari jumlah target Warga Penilai.

## 5. Menghubungi Warga Penilai

Setelah terpilihnya kandidat Warga Penilai maka Panitia Pelaksana kemudian bertanggung jawab untuk menghubungi para kandidat. Pada proses ini Panitia Pelaksana memberikan undangan dan menjelaskan maksud, tujuan, dan proses Review Program serta peran dan tugas Warga Penilai sehingga kandidat Warga Penilai diharapkan memahami tugasnya secara baik sebelum mengambil keputusan untuk berpartisipasi. Untuk menghubungi Warga Penilai, Panitia Pelaksana dapat mendatangi secara langsung ataupun mendelegasikan tugas kepada kantor/unit di bawahnya. Hanya saja perlu diperhatikan dan dipastikan bahwa pihak yang diberi delegasi tugas harus memahami dan menyampaikan informasi mengenai Review Program kepada kandidat Warga Penilai secara lengkap, baik, dan jelas. Warga Penilai juga perlu dijelaskan bahwa mereka harus menghadiri sesi Penjelasan dan sesi Review Program.



## 6. Pemilihan Evaluator

Panitia Pelaksana selanjutnya perlu menentukan dan menghubungi Evaluator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih Evaluator adalah (a) harus berasal dari luar pemerintahan dan wilayah administrasi, dan (b) harus bisa berpikir secara objektif serta kritis tanpa memihak. Evaluator tidak harus memiliki latar belakang atau keahlian yang selaras dengan program/kegiatan yang dievaluasi. Yang terpenting mereka dapat berpikir secara kritis, logis, dan objektif. Pemilihan komposisi Evaluator sebaiknya juga memperhatikan aspek keterwakilan gender agar dapat memberikan perspektif yang beragam.

## 7. Pemilihan Moderator

Moderator memiliki peran yang penting dalam proses Review Program. Moderator bertanggung jawab untuk memandu jalannya acara dan alur diskusi baik antara Evaluator dengan Pengampu Program maupun antara Warga Penilai dengan Pengampu Program. Pemilihan moderator perlu untuk memperhatikan kapasitas mereka untuk: (1) mencerna informasi, (2) mencerna pertanyaan dan mengartikulasikan pertanyaan yang sulit dipahami, (3) objektif, dan yang paling penting (4) memiliki keterampilan mengelola alur diskusi.

## 8. Pelatihan bagi Warga Penilai

Kandidat Warga Penilai yang sudah menyatakan bersedia berpartisipasi dalam Review Program kemudian diundang dalam sesi pelatihan mengenai Review Program. Pada sesi ini, dijelaskan mengenai rencana Review Program yang akan dilaksanakan, tahapan Review Program, serta peran dan tugas mereka selama proses Review Program. Selain itu, juga dibagikan Lembar Informasi Program dan Lembar Evaluasi Program kepada Warga Penilai. Panitia Pelaksana menjelaskan masing-masing lembar, cara membaca Lembar Informasi Program, dan termasuk cara mengisi Lembar Evaluasi Program. Pembagian Lembar Informasi Program ini bertujuan agar Warga Penilai dapat mempelajarinya lebih awal sebelum dilaksanakannya Review Program.

Sesi pelatihan idealnya dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Review Program. Namun, jika terdapat beberapa kondisi yang menyulitkan untuk dilakukan demikian, maka pelatihan Warga Penilai dapat dilakukan pada hari yang sama sesaat sebelum Review Program. Dengan memperhatikan kondisi

geografis dan keterbatasan waktu Warga Penilai, pelaksanaan pelatihan dapat diatur untuk memaksimalkan potensi kehadiran mereka. Dari sisi waktu, Warga Penilai tentu memiliki pekerjaan utama yang harus dihadiri. Mengajukan izin kerja sebanyak dua hari untuk mengikuti sesi Penjelasan dan sesi Review Program tentu menjadi tantangan. Salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan adalah menyelenggarakan sesi Penjelasan secara langsung sebelum sesi Review Program. Dengan catatan, Lembar Informasi Program dikirimkan terlebih dahulu kepada Warga Penilai.

## **9. Sesi Penjelasan bagi Evaluator dan Moderator**

Sesi Penjelasan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Evaluator dan Moderator mengenai Review Program dan peran yang masing-masing harus lakukan pada saat review. Penjelasan yang perlu disampaikan antara lain, susunan tatakala Review Program termasuk detail alokasi waktu, unsur-unsur yang akan terlibat dalam Review Program, peran Evaluator, dan peran Moderator. Salah satu hal penting yang perlu disampaikan kepada Evaluator yakni perannya sebagai penajam informasi, bukan sebagai penilai. Evaluator perlu untuk menahan diri untuk tidak menyampaikan opininya terlalu panjang

Sesi Penjelasan sebaiknya dilakukan secara langsung atau luring sehingga terjadi interaksi dan perkenalan antara Panitia Pelaksana, Evaluator, dan Moderator. Hal penting lain yang perlu dilaksanakan adalah kunjungan langsung oleh Evaluator dan Moderator ke lokasi program/kegiatan. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman Evaluator dan Moderator mengenai program yang dievaluasi. Apabila pertemuan secara langsung tidak dapat dilakukan karena alasan Evaluator mungkin berasal dari wilayah yang jauh dan memiliki kesibukan yang padat, maka pertemuan dapat dilakukan secara daring/online. Namun, ini sebaiknya menjadi alternatif terakhir.

Sedangkan untuk Moderator, perlu disampaikan perannya dalam mengorganisir proses diskusi yang terjadi dalam Review Program. Moderator perlu untuk memastikan proses diskusi berjalan dengan dinamis dan pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab oleh Pengampu Program dengan baik. Moderator berhak untuk memotong pertanyaan ataupun pernyataan yang terlalu panjang. Moderator bersama Panitia Pelaksana juga bertanggung jawab untuk memutuskan apabila

waktu diskusi perlu diperpanjang ketika memang ada banyak hal yang perlu didiskusikan, atau banyak pertanyaan yang ingin diajukan baik oleh Evaluator maupun Warga Penilai.

## 10. Publikasi Mengenai Review Program dan Lembar Informasi Program kepada Publik

Informasi mengenai pelaksanaan Review Program perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam Review Program, aparat pemerintah yang tidak terlibat, serta yang paling penting masyarakat umum. Sehingga Panitia Pelaksana perlu untuk memublikasikan informasi mengenai pelaksanaan Review Program secara terbuka termasuk Lembar Informasi Program yang akan digunakan agar dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang ingin menyaksikan Review Program juga dapat hadir. Selain itu, Review Program juga dapat disiarkan secara daring atau online agar dapat disaksikan secara lebih luas.



Setelah dilaksanakannya tahapan persiapan di atas, selanjutnya adalah pelaksanaan Review Program. Pelaksanaan Review Program perlu mempertimbangkan pemilihan waktu yang paling bersahabat bagi kandidat Warga Penilai sehingga mereka dapat hadir dan berpartisipasi dalam Review Program. Pemilihan waktu perlu mempertimbangkan apakah pada hari kerja atau hari libur, apakah pada pagi, siang, sore, atau malam hari. Semua pilihan tersebut memiliki konsekuensi kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang harus dipertimbangkan matang-matang. Misalnya, jika kegiatan dilaksanakan di malam hari, biasanya ini menyulitkan partisipasi perempuan khususnya ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Belum lagi jika jarak lokasi kegiatan dengan rumah jauh atau jalanan yang kurang aman bagi perempuan. Sebaliknya, jika kegiatan dilaksanakan pada siang hari, biasanya warga yang memiliki pekerjaan formal akan sulit berpartisipasi karena kesulitan meminta izin kepada pemberi kerja. Atau untuk pekerja harian, meninggalkan pekerjaan mereka akan menyebabkan kehilangan penghasilan mereka.

## 3.2 Persiapan Teknis dan Tata Letak Review Program

Untuk mewujudkan proses diskusi yang dinamis dan Review Program yang efektif, beberapa hal administratif dan teknis perlu disiapkan



Absensi terpisah



Lembar Informasi Program  
(dan lampirannya apabila ada)



Lembar Evaluasi Program



Lembar Rekap Penilaian

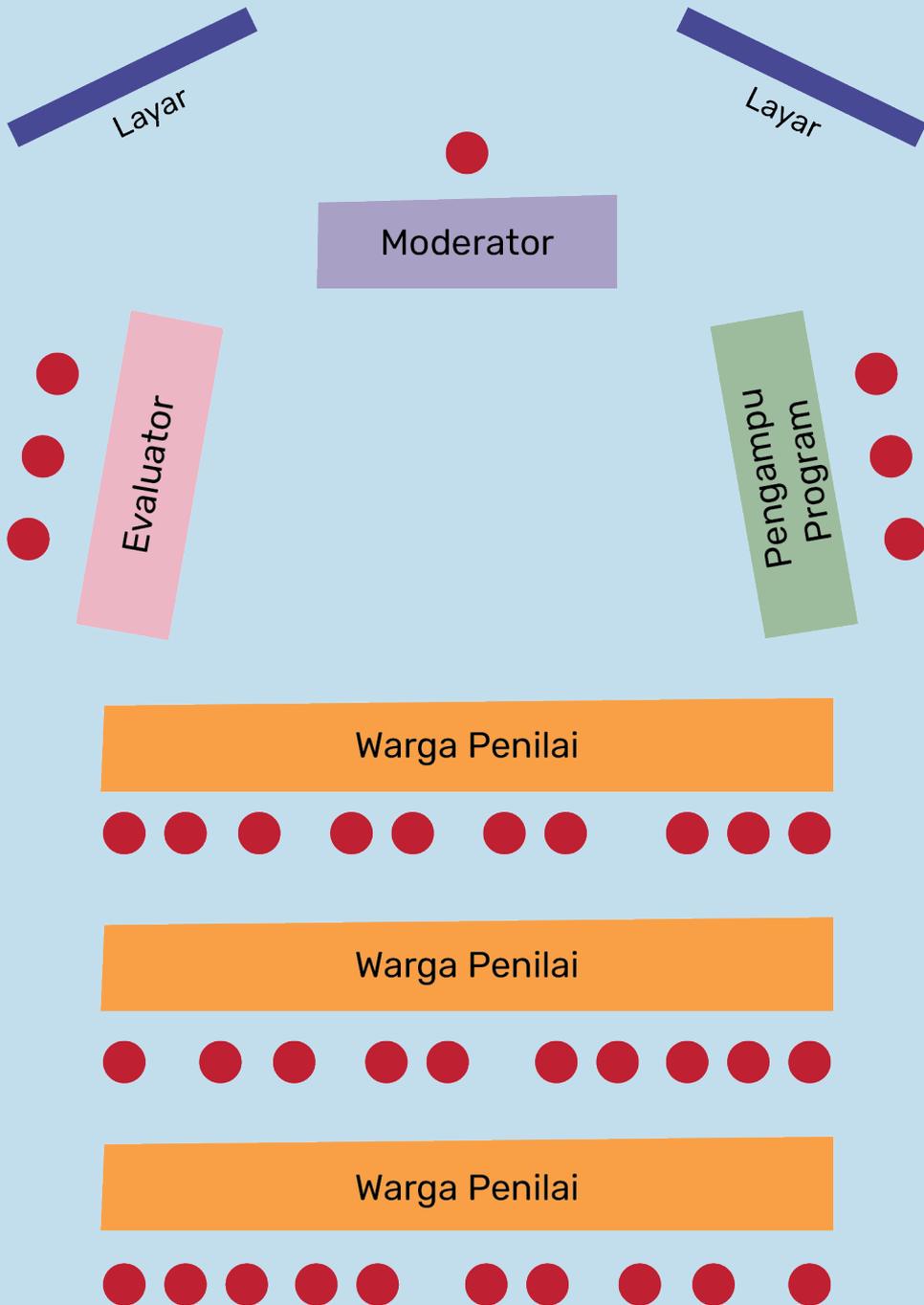
Tata letak atau posisi peserta/unsur Review Program diatur dengan mempertimbangkan interaksi antar unsur-unsur dalam Review Program agar tercipta diskusi yang dinamis dan efektif. Review Program sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup, tetapi jika tidak tersedia ruangan tertutup yang mampu mengakomodir seluruh unsur yang jumlahnya bisa mencapai 50 orang serta warga masyarakat yang ingin menyaksikan, maka kegiatan dapat dilaksanakan di ruangan semi terbuka seperti balai.

Tata letak seperti tergambar pada halaman **26** merupakan *setting* yang digunakan untuk Review Program di Indonesia yang diadaptasi dari Review Program di Jepang dengan modifikasi. Di bagian depan adalah Moderator, Evaluator, dan Pengampu Program sehingga memungkinkan terjadinya diskusi yang dinamis yang dapat disaksikan secara jelas oleh Warga Penilai. Tata letak ini juga memungkinkan terjadinya diskusi dan interaksi antara Warga Penilai dengan Pengampu Program.

Pada ilustrasi tersebut digunakan dua layar. Layar pertama dibutuhkan jika presentasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu PowerPoint. Apabila diputuskan penjelasan dilakukan tanpa PowerPoint, layar tersebut tidak diperlukan. Sedangkan layar yang satu lagi digunakan untuk menampilkan waktu sehingga semua unsur yang terlibat dalam Review Program dapat mengetahui alokasi waktu yang telah ditempuh dan yang tersisa ketika menyelenggarakan Review Program, termasuk alokasi waktu untuk masing-masing sesi.

Tamu undangan maupun masyarakat yang hadir menyaksikan Review Program dapat diatur posisi tempat duduknya, menyesuaikan dengan ketersediaan ruangan tanpa mengubah tata letak untuk unsur-unsur di atas. Mereka yang menyaksikan Review Program dapat diatur tempat duduknya di belakang atau samping Warga Penilai maupun di belakang Evaluator dan Pengampu Program. Yang penting untuk diingat, perlu diberikan jarak pemisah antara tempat duduk Warga Penilai dengan tamu undangan atau warga masyarakat lainnya yang hadir agar tidak tercampur. Panitia Pelaksana perlu memastikan bahwa Moderator, Evaluator, Pengampu Program, dan Warga Penilai disediakan meja karena mereka perlu untuk membuat catatan-catatan. Pada masing-masing meja perlu diberikan keterangan tertulis unsur apa yang akan menempatnya: Moderator, Evaluator, Pengampu Program, atau Warga Penilai.

## Tata Letak Ruangan Review Program





# Bagian

# 04

- 1
- 2
- 3



## Alur Pelaksanaan Review Program



Review Program memiliki urutan tahapan yang baku untuk memastikan diskusi yang dilaksanakan dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alur utama pelaksanaan Review Program untuk evaluasi per satu program yaitu dimulai dari (1) penjelasan program, (2) diskusi antara Evaluator dan Pengampu Program, (3) diskusi antara Warga Penilai dan Pengampu Program, (4) pengisian Lembar Evaluasi Program, dan (5) perhitungan Lembar Evaluasi Program serta pengumuman hasil keputusan. Review Program dilaksanakan per satu program atau kegiatan dalam durasi waktu sekitar 1 hingga 1.5 jam dengan hasil yang jelas.

1

**10 Menit**

Penjelasan mengenai program atau kegiatan yang dievaluasi oleh Pengampu Program



2

**25 Menit\***

Diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program



3

**15 Menit\***

Tanya jawab antara Warga Penilai dengan Pengampu Program



**4****5 Menit**

Warga Penilai mengisi  
Lembar Evaluasi Program

**5****5 Menit**

Penghitungan hasil  
Lembar Evaluasi Program



**\*Durasi waktu dapat disesuaikan sesuai kebutuhan**

## **1. Penjelasan Program dari Pengampu Program**

Review Program diawali dengan penjelasan oleh Pengampu Program tentang program/kegiatan yang dievaluasi. Presentasi dilakukan selama sepuluh menit dengan menekankan pada informasi dan poin-poin penting terkait program/kegiatan. Perlu disampaikan kepada Pengampu Program agar menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas serta fokus pada informasi yang belum tertulis di Lembar Informasi Program, tetapi penting untuk diketahui Warga Penilai maupun Evaluator. Jika menggunakan alat bantu presentasi berupa PowerPoint, jangan mengopi tulisan pada Lembar Informasi Program, tetapi tampilkan informasi visual yang membantu menjelaskan jalannya program/kegiatan seperti foto ataupun infografik. Penggunaan alat bantu berupa PowerPoint sendiri bukan merupakan suatu keharusan. Bila penjelasan bisa disampaikan dengan lebih baik tanpa PowerPoint, maka tidak perlu menggunakannya.

## **2. Diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program**

Pascapresentasi, sesi dilanjutkan dengan diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program. Evaluator bertugas untuk menggali informasi tambahan dari Pengampu Program, mengkonfirmasi informasi yang belum jelas, dan menegaskan informasi penting melalui diskusi dengan Pengampu Program yang akan membantu Warga Penilai dalam mengambil keputusan. Evaluator dalam mengajukan pertanyaan perlu menyampaikan secara singkat. Di samping itu, Evaluator hanya menanyakan satu pertanyaan di setiap kesempatan untuk memastikan Pengampu Program tidak kehilangan fokus dan mampu menjawab dengan tepat. Hal ini juga untuk mempermudah Warga Penilai mengikuti isi diskusi. Sesi diskusi ini dilakukan selama sekitar 25-30 menit atau lebih lama jika memang masih ada topik diskusi yang perlu dibahas dan dinamika diskusi yang ramai.

## **3. Diskusi antara Warga Penilai dengan Pengampu Program**

Sesi diskusi Warga Penilai dengan Pengampu Program dialokasikan untuk memberikan kesempatan bagi Warga Penilai untuk mendalami informasi atau memperoleh informasi tambahan terkait program/kegiatan. Sesi ini berlangsung sekitar 10-15 menit, di mana waktu untuk sesi ini dapat disesuaikan dengan dinamika diskusi. Jika memang banyak warga yang ingin bertanya atau

berpendapat, durasi diskusi dapat ditambah. Dalam proses tanya jawab, Warga Penilai dibatasi untuk memberikan satu pertanyaan saja pada masing-masing kesempatan. Selain itu, juga perlu diingatkan agar pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.

#### **4. Pengisian Lembar Evaluasi Program**

Pascasesi diskusi, selanjutnya Warga Penilai mengisi Lembar Evaluasi Program untuk memilih apakah program/kegiatan perlu dilanjutkan, diperbaiki, ataukah dihentikan. Warga Penilai diberikan waktu selama lima menit untuk memilih serta menuliskan catatan terkait program yang dievaluasi. Catatan yang dituliskan dapat berkaitan dengan segala hal mengenai program, baik berupa usulan, kritikan, maupun saran. Warga Penilai dapat pula mulai mengisi bagian lembar catatan (halaman kedua Lembar Evaluasi Program) pada proses presentasi dan diskusi.

#### **5. Penghitungan dan Pengumuman Hasil**

Panitia Pelaksana mengumpulkan Lembar Evaluasi Program yang telah diisi dan selanjutnya melakukan perhitungan secara terbuka. Penghitungan Lembar Evaluasi Program dilakukan menyerupai penghitungan hasil pemilu di depan seluruh peserta kegiatan. Hasil kemudian diumumkan dan beberapa catatan dapat dibacakan.

Durasi diskusi antara Pengampu Program dengan Evaluator maupun diskusi Pengampu Program dengan Warga Penilai dapat ditambah apabila memang ada banyak pertanyaan yang belum terjawab terutama dari masyarakat. Penambahan alokasi waktu dapat dilakukan sejak awal penyusunan tatakala kegiatan, atau secara spontan pada saat pelaksanaan diskusi. Perlu diingat bahwa Review Program dapat dilaksanakan antara 1 jam hingga 1,5 jam.

## Rangkuman Peran Panitia Pelaksana pada Masing-Masing Tahap Review Program

Berikut merupakan rangkuman peran atau tugas Panitia Pelaksana dari tahap persiapan hingga pasca-Review Program. Daftar peran ini dapat menjadi panduan untuk membagi tugas antar-anggota Panitia Pelaksana maupun *check list* atas pelaksanaan tahapan persiapan.

Tahapan	No	Tugas	Penanggung Jawab	Cek
Pengisian Lembar Informasi Program	1.a	Menghubungi unit, bagian, dinas, atau instansi terkait mengenai rencana Review Program. terkait rencana Review Program .		
	1.b	Memberikan penjelasan kepada unit, bagian, instansi terkait mengenai Review Program termasuk alasan dan tujuan pelaksanaan evaluasi atas program/kegiatan.		
	1.c	Mendampingi Pengampu Program untuk mengisi Lembar Informasi Program.		
	1.d	Memastikan Lembar Informasi Program terisi dengan baik.		
Menghubungi Warga Penilai	2.a	Melakukan pengacakan untuk pemilihan Warga Penilai.		
	2.b	Membuat daftar kandidat Warga Penilai dan daftar cadangan.		
Pemilihan Warga Penilai	3.a	Menyiapkan undangan, informasi berkaitan dengan Review Program, dan surat pernyataan kesediaan berpartisipasi.		

Tahapan	No	Tugas	Penanggung Jawab	Cekv
	3.b	Menghubungi Warga Penilai.		
	3.c	Melakukan pencatatan/ <i>tracking</i> atas kandidat Warga Penilai yang bersedia dan menolak mengikuti Review Program.		
	3.d	Menentukan kandidat cadangan Warga Penilai yang harus dihubungi ketika ada kandidat utama yang menolak.		
	3.e	Menorganisir sesi pelatihan bagi Warga Penilai		
Pemilihan Evaluator dan Moderator	4.a	Menentukan Evaluator dan Moderator.		
	4.b	Menghubungi Evaluator dan Moderator		
	4.c	Mengorganisasi sesi Penjelasan bagi Evaluator dan Moderator		
Pra-Review Program	5.a	Menyiapkan informasi tentang pelaksanaan Review Program dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas. Publikasi dapat dilakukan melalui media yang dimiliki pemerintah maupun dapat pula bekerja sama dengan pihak lain. Material publikasi termasuk juga Lembar Informasi Program.		
	5.b	Menyiapkan dan mendistribusikan undangan serta tatakala kegiatan.		

Tahapan	No	Tugas	Penanggung Jawab	Cek
	5.c	Mempersiapkan teknis siaran langsung melalui Zoom atau YouTube apabila proses Review Program ingin disiarkan secara daring kepada masyarakat.		
	5.d	Mencetak Lembar Informasi Program.		
	5.e	Mencetak Lembar Evaluasi Program.		
	5.f	Mencetak Lembar Rekap Penilaian.		
	5.g	Mempersiapkan ruangan sesuai tata letak ruangan yang telah ditentukan.		
Pelaksanaan Review Program	6.a	Memastikan unsur Review Program hadir dan memposisikan dirinya di posisi yang telah disediakan.		
	6.b	Membagikan Lembar Informasi Program dan Lembar Evaluasi Program kepada Warga Penilai.		
	6.c	Membagikan Lembar Informasi Program kepada semua yang hadir.		
	6.d	Mengantarkan masing-masing unsur dalam Review Program untuk berada pada posisinya dan memastikan tidak tertukar tempat duduk.		
	6.e	Menjaga alokasi waktu (timer).		

Tahapan	No	Tugas	Penanggung Jawab	Cekv
	6.f	Membantu presentasi sebagai operator PowerPoint apabila menggunakan.		
	6.g	Mengumpulkan Lembar Evaluasi Program yang telah diisi.		
	6.h	Menghitung hasil Lembar Evaluasi Program.		
	6.i	Mengumumkan hasil Lembar Evaluasi Program.		
Pasca-Review Program	7.a	Menyusun rekap hasil dan catatan dari Lembar Evaluasi Program.		
	7.b	Menyusun laporan atas pelaksanaan Review Program.		
	7.c	Menyerahkan rekap hasil dan catatan kepada pengampu program dan unit atau instansi terkait.		
	7.d	Menyerahkan rekap hasil dan catatan serta laporan kepada pemangku kepentingan.		

## "Apabila Anda bertugas sebagai Evaluator atau Moderator, berikut hal-hal yang perlu diingat".



### 1. Evaluators

Sebagai Evaluators, tugas Anda adalah untuk mengkonfirmasi informasi yang belum jelas atau tidak sinkron, bersikap kritis terhadap informasi yang ada, serta menggali informasi tambahan atas informasi yang dituliskan pada Lembar Informasi Program maupun yang disampaikan dalam presentasi. Evaluators dapat memberikan kritikan, saran, atau masukan, tetapi fokus utama Anda adalah membantu Warga Penilai untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi program maupun hasilnya dengan lebih jelas dan baik. Kritik, saran, maupun masukan harap disampaikan secara ringkas sehingga tidak banyak memakan waktu diskusi.

Sebelum pelaksanaan Review Program, seorang Evaluators harus mempersiapkan diri dan membekali diri dengan berbagai informasi dasar terkait daerah yang akan dievaluasi serta terkait program yang dievaluasi. Informasi dasar yang penting untuk diperoleh seperti misalnya jumlah penduduk, industri utama, ciri khas, dan masalah-masalah umum yang dihadapi daerah yang kiranya berkaitan dengan program yang dievaluasi.



## 2. Moderator

Moderator dalam Review Program bertugas memandu jalannya acara dan jalannya diskusi. Selama proses Review Program, Moderator perlu memperhatikan alokasi waktu setiap sesi dan mengikuti alokasi waktu dengan tepat. Dalam memandu jalannya diskusi, Moderator perlu menegaskan kepada peserta kegiatan mengenai pentingnya Evaluator maupun Warga Penilai untuk mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Selain itu, moderator perlu untuk mengingatkan Pengampu Program agar menyampaikan jawaban secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami.

Moderator perlu berkoordinasi dan berdiskusi dengan Panitia Pelaksana untuk memastikan urutan tatakala kegiatan dan durasi diskusi yang akan diselenggarakan. Penting pula untuk Moderator mempelajari mengenai program/kegiatan yang akan dievaluasi beberapa hari sebelum pelaksanaan Review Program. Jika diperlukan, Moderator bisa berdiskusi dengan Pengampu Program untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program/kegiatan yang akan dievaluasi.

# Bagian

# 05



## 5.1 Tindak Lanjut Pasca-Review Program

Pelaksanaan Review Program bukanlah akhir, tetapi justru awal baru dari program yang dievaluasi. Setelah pelaksanaan Review Program, Panitia Pelaksana bertanggung jawab untuk membuat daftar atau rekap atas hasil perhitungan suara dan masukan-masukan yang dituliskan oleh Warga Penilai. Daftar ini kemudian menjadi bagian dari laporan Review Program yang diserahkan kepada pemangku kepentingan seperti pengampu program, organisasi pengampu program, atau instansi/unit lain yang terkait.

Di kedua desa yang telah melaksanakan Review Program yakni Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) bertanggung jawab untuk mengawal hasil Review Program dan memastikan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Pasca-Review Program, Panitia Pelaksana menyerahkan laporan kepada BAMUSKAL. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di tahun selanjutnya.

Di Jepang sendiri, tidak ada regulasi yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti atau menindaklanjuti hasil dari Review Program. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan yang dihasilkan dari Review Program sebagai tanggung jawab terhadap proses evaluasi yang dijalankan secara transparan bersama masyarakat. Tindak lanjut yang diambil merupakan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat terutama yang mengikuti Review Program. Di sisi lain, dikarenakan proses Review Program dilakukan bersama Warga Penilai yang merupakan perwakilan masyarakat dan diikuti secara langsung oleh masyarakat, maka secara tidak langsung ada tekanan dari masyarakat untuk pemerintah melakukan tindak lanjut. Akan menjadi lebih ideal apabila kemudian pemerintah juga mengumumkan kepada publik rencana tindak lanjut dan realisasi atas hasil Review Program kepada masyarakat.

## 5.2 Cerita Perubahan

Tahun 2022 yang lalu, tepatnya pada 20 dan 21 Mei 2022, telah dilaksanakan “Uji coba Pelaksanaan Review Program” di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo, Kabupaten Bantul. Di masing-masing kalurahan ada dua program/kegiatan yang di-review. Di Kalurahan Guwosari program yang di-review adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Balita dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara di Kalurahan Sriharjo program yang di-review adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Stunting dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di Guwosari, RTLH dipilih sebagai salah satu program yang di-review karena pemerintah kalurahan mendengar adanya keberatan dari masyarakat penerima bantuan dana RTLH. Masyarakat merasa adanya syarat kontribusi swadaya untuk biaya upah tenaga kerja dan konsumsi memberatkan penerima manfaat. Ada masyarakat yang merasa anggaran swadaya yang dikeluarkan ‘tidak *cucuk*’ (tidak sepadan) dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kalurahan yang sebesar Rp18.025.000,-/rumah untuk pembelian material. Hal tersebut terutama dirasakan oleh keluarga miskin yang kondisi rumahnya rusak berat.

Di Sriharjo, PMT Balita Stunting dipilih untuk di-review karena pemerintah kalurahan memandang perlunya adanya inovasi untuk mengurangi jumlah balita stunting yang ada. Pada tahun anggaran 2021 data menunjukkan di Kalurahan Sriharjo terdapat 548 balita, dengan status balita stunting sejumlah 28 anak. Dalam penyediaan PMT, Kalurahan Sriharjo bekerja sama dengan catering dengan anggaran per anak sebesar Rp17.500,-/paket. Pemberian makanan tambahan dilakukan 30 kali yang terdiri atas nasi, sayur, lauk nabati/hewani, buah, dan biskuit sehat. Pendistribusian makanan biasanya dilakukan oleh Kader Posyandu. Ketika mendistribusikan makanan, kader biasanya juga melakukan edukasi kepada orang tua yang balitanya mengalami stunting.

Baik di Guwosari dan Sriharjo, hasil review atas program/kegiatan tersebut, Warga Penilai yang hadir dalam kegiatan Review Program mayoritas menghendaki program tersebut tetap dipertahankan dengan perbaikan. Untuk RTLH di Kalurahan

Guwosari, dari 29 orang Warga Penilai yang hadir dengan 13 orang menghendaki adanya perbaikan, 8 orang menghendaki untuk dihentikan, dan 8 orang menilai program RTLH sudah baik. Sedangkan untuk PMT di Kalurahan Sriharjo, 20 orang Warga Penilai menghendaki adanya perbaikan, 9 orang menilai program sudah baik, dan 1 Warga Penilai yang tidak memberikan penilaian.

Dari hasil review tersebut, perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari terhadap Program RTLH adalah dengan: 1) Pemerintah Kalurahan Guwosari awalnya akan menaikkan anggaran RTLH, tetapi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa memberikan batasan maksimal anggaran RTLH sebesar Rp10.000.000,- sehingga kenaikan anggaran tidak bisa dilakukan; 2) Dalam menentukan penerima manfaat pemerintah kalurahan melakukan *assessment* secara mendalam. Setidaknya ada dua hal yang diperhatikan dan diperiksa, yaitu tingkat kerusakan atau kondisi rumah, dan kesiapan penerima manfaat untuk berswadaya. Dari hasil pemeriksaan tersebut pemerintah kalurahan kemudian akan menentukan sumber anggaran biaya RTLH. Misal, jika ditemukan rumah dengan tingkat kerusakan ringan, biaya RTLH akan dibebankan pada anggaran kalurahan yang sebesar Rp10.000.000. Jika kerusakan sedang-ringan sampai sedang-berat, anggaran akan dibebankan pada APBD dengan besar anggaran Rp17.500.000,- dan APBN (anggaran dari Kementerian PUPR) dengan besar anggaran Rp35.000.000,-. Dan jika ditemukan rumah dengan tingkat kerusakan berat, biaya RTLH akan dibebankan pada APBD provinsi sebesar Rp50.000.000,-; 3) Untuk menyelesaikan masalah adanya warga masyarakat penerima manfaat yang merasa berat ketika harus berswadaya, strategi yang digunakan oleh pemerintah kalurahan adalah mendorong adanya gotong royong dengan mengkonsolidasikan sumber daya yang ada di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dengan demikian, beban swadaya tidak lagi ditanggung oleh satu keluarga melainkan dipikul bersama satu lingkup RT.

Untuk program PMT di Kalurahan Sriharjo perubahan yang dilakukan pemerintah kalurahan setelah program di-review adalah 1) Pemerintah Kalurahan Sriharjo mengalokasikan anggaran khusus bagi balita stunting untuk melakukan konseling dan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. Dari konseling tersebut, biasanya akan terpetakan masalah yang sedang dihadapi hingga balita mengalami stunting. Hasil

konseling dan pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah kalurahan dalam menanggulangi stunting. Dengan demikian, ”intervensi” yang dilakukan pada masing-masing balita menjadi tidak sama. Misalnya, dalam hal pemberian makanan tambahan untuk masing-masing balita menjadi tidak sama, tergantung dari identifikasi penyebab stunting yang dilakukan oleh dokter; 2) Pemerintah Kalurahan Sriharjo selektif dalam memberikan bantuan PMT bagi balita stunting. Bersama kader Posyandu pemerintahan kalurahan melakukan assessment kemampuan ekonomi keluarga balita yang mengalami stunting. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah balita stunting akan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah kalurahan atau tidak. Bagi keluarga yang mampu PMT diminta untuk dicukupi sendiri sedangkan bagi keluarga kurang dan tidak mampu pemerintah kalurahan akan memberikan bantuan anggaran dengan besaran beragam.

Selain perbaikan secara langsung terhadap program yang telah di-review, Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga mengadopsi metode pemilihan Warga Penilai secara acak untuk dipakai saat menentukan warga masyarakat yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2022. Pemilihan secara acak tersebut dipakai karena pemerintah kalurahan merasa bahwa informasi tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kalurahan belum merata. Dengan Penentuan warga masyarakat yang diundang secara acak tersebut, diharapkan penyebaran informasi pembangunan yang telah dilaksanakan berikut capaian yang telah diraih bisa dipercepat.

Hal umum terkait dengan Uji Coba Pelaksanaan Review Program yang muncul dari Kalurahan Guwosari adalah munculnya ide-ide perbaikan program/kegiatan yang muncul dari masyarakat. Review Program oleh perangkat kalurahan dipandang sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga perangkat kalurahan bisa “belanja ide” perbaikan program yang sedang di-review dari masyarakat maupun dari evaluator yang dihadirkan.



# Bagian

# 006



## Pembiayaan Review Program

Meskipun dapat dilaksanakan secara sederhana, pelaksanaan Review Program tetap membutuhkan biaya. Review Program memiliki keunggulan karena dapat dilakukan secara sederhana selama ada ruang yang mencukupi seperti ruang rapat atau meminjam ruang kelas sekolah. Sangat disarankan untuk menyelenggarakan Review Program dengan sederhana. Hal ini dilakukan agar membantu penghematan anggaran pemerintah dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, bukan malah menjadi sumber pemborosan baru. Meski demikian, ketika mengundang berbagai pihak, tentu setidaknya perlu untuk menyediakan minuman dan kudapan, atau di beberapa kasus uang transportasi. Tentu ini membutuhkan alokasi dari anggaran pemerintah. Dalam urusan pembiayaan ini, seringkali pemerintah mengalami keraguan ketika akan menginisiasi dan membiayai suatu program atau kegiatan baru yang tidak ada landasan dasar hukum maupun regulasi.

Ketika pemerintah perlu untuk menyiapkan anggaran, terkadang ada kekhawatiran harus menggunakan slot anggaran yang mana. Terlebih lagi jika dihadapkan dengan sistem keuangan yang diatur ketat secara elektronik. Atau ada pertanyaan apa dasar/landasan kebijakan yang akan digunakan penganggaran agar tidak kemudian menjadi temuan audit pemeriksaan keuangan. Sejumlah opsi yang dapat dipilih untuk memastikan inovasi baru seperti Review Program dapat dibiayai tanpa bertentangan dengan aturan sistem keuangan antara lain: 1) Menggunakan anggaran monitoring dan evaluasi karena pada dasarnya Review Program merupakan metode untuk melakukan evaluasi. 2) Di tingkat desa, Review Program dapat dilakukan oleh dan menggunakan anggaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini karena pada dasarnya BPD memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pemerintah. 3) Membiayai Review Program secara terpisah dengan menyiapkan regulasi pendukung. Di sini, pemerintah dapat membuat surat keterangan atau peraturan pendukung sehingga pembiayaan terpisah dapat dianggarkan.

# Bagian

# 07



## 7.1 Review Program di Tingkat Desa dan Kabupaten

Selama dua tahun terakhir, uji coba Review Program telah dilaksanakan di tingkat desa dan kabupaten. Uji coba di tingkat desa dilaksanakan pada tahun 2022 di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, sedangkan uji coba tingkat kabupaten dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun yang sama, juga dilaksanakan secara langsung Review Program (non-uji coba) di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo.

### Review Program di Kalurahan Sriharjo

Review Program di Kalurahan Sriharjo dilaksanakan pada 19 Mei 2023 dengan agenda evaluasi kegiatan pengelolaan *foodcourt* Srikeminut dan Hari Jadi Kalurahan Sriharjo. Kedua program/kegiatan ini dievaluasi berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) setelah melewati proses penjangkangan aspirasi dari masyarakat yang telah dilakukan sejak Desember 2022 hingga konsultasi publik pada Maret 2023.

Pengelolaan *foodcourt* Srikeminut oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dievaluasi karena *foodcourt* tidak berjalan dengan baik. Situasinya, hanya ada dua pedagang yang mengisi 20 slot yang tersedia. Di sisi lain, pengunjung pun dapat dihitung dengan jari setiap harinya karena menurunnya jumlah wisatawan di kawasan Srikeminut. *Foodcourt* diharapkan tetap dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi salah satu destinasi kuliner yang mampu menjadi sumber pendapatan desa. Kegiatan lain yang turut dievaluasi adalah fasilitasi perayaan Hari Jadi Kalurahan Sriharjo. Kegiatan ini dipilih karena memakan anggaran yang sangat besar melebihi kemampuan pembiayaan pemerintah kalurahan serta pelaksanaannya yang menyita banyak tenaga. Meski demikian, kegiatan ini diminati oleh masyarakat yang ditandai dengan partisipasi yang tinggi dalam sejumlah kegiatan yang diselenggarakan.

Proses evaluasi untuk kedua kegiatan di Kalurahan Sriharjo tersebut berjalan dengan baik. Pada hari evaluasi, bergabung tiga evaluator, yaitu Agus Subagya selaku anggota Bamuskal Panggunharjo, Khatami Anggara Kusumah selaku konsultan BUMDes dan UMKM, serta Sutoro Eko sebagai Kepala STPMD “APMD” Yogyakarta. Sesi diskusi dipandu sepenuhnya oleh Sri Surani, anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY. Dari 30 Warga Penilai yang menyatakan diri bersedia berpartisipasi dan telah memperoleh pelatihan, terdapat 28 yang hadir pada Review Program di Kalurahan Sriharjo.

Pengelolaan foodcourt Srikeminut oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) menjadi kegiatan pertama yang dievaluasi pada malam tersebut. Review diawali dengan penjelasan mengenai kegiatan oleh perangkat kalurahan sebagai pengampu program yaitu Gotro Raharjo, S.Si dan tim dalam waktu sepuluh menit. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab antara Evaluator dan Pengampu Program selama 20 menit. Selanjutnya, Warga Penilai mendapat giliran untuk bertanya dan menyampaikan saran serta kritik terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan selama 15 menit. Warga Penilai lanjut memberikan keputusan atas keberlanjutan kegiatan dengan mengisi Lembar Evaluasi Program. Hasilnya, untuk program pengelolaan foodcourt Srikeminut oleh BUMKal, empat Warga Penilai menyatakan bahwa pengelolaan sudah baik dan tidak perlu diubah, sementara 24 Warga Penilai lain memilih agar program diperbaiki.

Review Program kemudian berlanjut ke evaluasi kegiatan fasilitasi perayaan Hari Jadi Kalurahan Sriharjo. Urutan dan pembagian waktu jalannya diskusi berlangsung sama dengan sesi evaluasi pertama, termasuk susunan Warga Penilai dan evaluatornya. Hanya saja, Pengampu Program yang memberikan penjelasan tentu saja berbeda. Sesi kedua diisi presentasi oleh Nur Hidayat, S.Pdi. dan staf kamituwo (bagian sosial) lainnya. Presentasi Pengampu Program selama 10 menit kemudian diteruskan dengan tanya jawab antara Evaluator dan Pengampu Program selama 20 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan tanya jawab antara Warga Penilai dengan Pengampu Program. Sesi dilanjutkan dengan pengisian Lembar Evaluasi Program oleh Warga Penilai selama lima menit. Setelah itu, Panitia Pelaksana mengumpulkan Lembar Evaluasi yang sudah diisi untuk dihitung secara terbuka. Hasil evaluasi menunjukkan lima orang menilai kegiatan sudah berjalan dengan baik, tetapi 23 Warga Penilai lainnya menyatakan bahwa kegiatan tersebut perlu diperbaiki. Hasil ini menjadi landasan jika ingin mengadakan kegiatan serupa.



\*Tulisan ini merupakan bagian dari artikel yang pernah diunggah di website Yayasan Tifa, digunakan kembali dengan penyesuaian.

## Review Program di Kalurahan Guvosari

Kalurahan Guvosari kembali melaksanakan Review Program pada Sabtu, 20 Mei 2023. Kali ini agendanya adalah evaluasi atas program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi dan program layanan sampah BUMKAL Guvosari Maju Sejahtera unit Go-Sari. BUMKAL Guvosari memilih program-program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan masyarakat. Guvosari memiliki beberapa kasus kematian ibu hamil berisiko tinggi sehingga ini menjadi perhatian pemerintah kalurahan. Sayangnya, program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi melalui pemberian bantuan ayam petelur untuk dipelihara oleh beberapa pihak dinilai kurang efektif dan justru membebani ibu hamil. Sementara itu, untuk program layanan sampah BUMKAL unit Go-Sari dinilai belum diimplementasikan secara optimal karena layanan belum berjalan seperti yang dijanjikan oleh pengelola.

Tiga evaluator hadir pada Review Program di Kalurahan Guvosari. Pertama, Wahyudi Anggoro Hadi selaku Lurah Panggunharjo. Kedua, Bayu Imamtoko sebagai konsultan dari Resikplus, sebuah organisasi yang bergerak pada isu kebersihan dan lingkungan. Ketiga, Annida Hanifah, ahli gizi dari Yayasan Rumah Pelita Indonesia. Diskusi di Guvosari dimoderatori oleh Ahmad Yunadi, dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Susunan acara Review Program dan proses diskusi di Kalurahan Guvosari berjalan dengan komposisi 10 menit penjelasan kegiatan, 20 menit tanya jawab Evaluator dengan Pengampu Program, serta 15 menit tanya jawab Warga Penilai dengan Pengampu Program untuk evaluasi masing-masing kegiatan. Diskusi berjalan dinamis. Seluruh Warga Penilai sejumlah 30 orang menghadiri dan memberikan penilaian mereka dalam Review Program Kalurahan Guvosari. Warga penilai banyak yang mengajukan pertanyaan kepada Pengampu Program terkait. Saran dan kritikan pun tak jarang dilontarkan oleh Warga Penilai terutama yang memiliki pengalaman langsung bersentuhan dengan program.

Program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi dievaluasi pada sesi pertama. Adapun hasilnya, Warga Penilai sejumlah 23 Warga Penilai memutuskan bahwa program pendampingan ibu hamil berisiko tinggi harus diperbaiki, 3 orang menilai program sudah baik, sementara 4 orang memutuskan program yang dilakukan dengan memberikan bantuan ayam petelur pada ibu hamil tersebut harus dihentikan.

Sementara untuk evaluasi kegiatan layanan sampah yang dievaluasi pada sesi kedua, menghasilkan keputusan 23 Warga Penilai memilih program perlu diperbaiki, 1 orang menilai program perlu dihentikan, dan 6 Warga Penilai lain memutuskan program sudah baik sehingga tidak perlu ada perubahan atau perbaikan. Pasca-dua rangkaian Review Program, Lurah Guwosari Masduki Rahmad memberikan tanggapannya atas penyelenggaraan Review Program.



\*Tulisan ini merupakan bagian dari artikel yang pernah diunggah di website Yayasan Tifa, digunakan kembali dengan penyesuaian.

## Uji Coba di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Juni 2023, uji coba Review Program di Kabupaten Bantul diorganisir oleh Panitia Pelaksana yang berasal dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda Bantul. Tiga OPD tersebut yaitu BAPPEDA, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemda Bantul, dan Inspektorat. Panitia Pelaksana telah bekerja selama kurang lebih dua bulan untuk mempersiapkan Review Program. Dua kegiatan pemerintah dipilih untuk dievaluasi: Pajak Award dan pengadaan lampu penerangan jalan umum. Pajak Award merupakan salah satu kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Kegiatan ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak serta institusi yang membantu mengumpulkan pajak seperti kalurahan (desa) dan kapanewon (kecamatan) atas capaian peroleh pembayaran dan pengumpulan pajak.

Uji coba Review Program di Kabupaten Bantul melibatkan empat orang evaluator Timotius Apriyanto dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Yogyakarta, Deni Prasetyo Nugroho, S.T., M.T., IPM. dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM, Rifat Pasha, ME., MAPP dari Bank Indonesia cabang Yogyakarta, dan Agus Salim dari BAPPEDA Kota Yogyakarta. Pemilihan evaluator dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang pekerjaan serta pengetahuan yang dimiliki.

Dalam proses diskusi, muncul berbagai pertanyaan, kritikan, saran, pernyataan, dan informasi dari berbagai pihak yang terlibat terkait implementasi dan capaian kegiatan Pajak Award. Evaluator mengajukan berbagai pertanyaan kritis terhadap Pengampu Program atas pilihan kegiatan maupun langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan kegiatan. Warga Penilai juga turut menyampaikan pendapat maupun problem yang selama ini dialami ketika hendak membayarkan pajak. Evaluasi Warga Penilai memutuskan bahwa kegiatan perlu diperbaiki dengan 22 suara, sedangkan 10 Warga Penilai merasa kegiatan sudah baik sehingga dapat dilanjutkan tanpa perubahan.

Kegiatan lainnya yang dievaluasi yaitu pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Program ini sudah rutin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kebutuhan penerangan jalan adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul, di mana Bantul menempati peringkat lima besar nasional. Kegiatan ini penting untuk di-review mengingat adanya problem ketidakmerataan fasilitas penerangan jalan. Ketidakmerataan pembangunan pun disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya intervensi politik dari anggota legislatif. Hal ini banyak dibahas selama proses tanya jawab. Evaluator pun memberikan beberapa pandangan dan masukan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pemerataan penerangan jalan. Di sisi lain, Warga Penilai juga banyak menyampaikan pertanyaan maupun problem yang terjadi di wilayahnya berkaitan dengan penerangan jalan. Setelah sesi diskusi, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi pengisian Lembar Evaluasi Program. Setelah semua Warga Penilai mengisi Lembar Evaluasi Program, Panitia Pelaksana mengumpulkan dan menghitung suara yang tertuang dalam Lembar Evaluasi Program. Hasil evaluasi dari Warga Penilai memutuskan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum perlu untuk diperbaiki sebanyak 24 suara, sementara 6 warga menilai program sudah baik dan perlu dilanjutkan, 1 warga menilai bahwa kegiatan dapat dihentikan.



\*Tulisan ini merupakan bagian dari artikel yang pernah diunggah di website Yayasan Tifa, digunakan kembali dengan penyesuaian.

## 7.2 Pendapat Mereka Tentang Review Program

“Review Program sangat bermanfaat bagi pengampu program kegiatan untuk di kemudian hari pada saat penyesuaian kegiatan dapat lebih baik, lebih siap, dan tentu saja tepat sasaran. Yang paling penting di Review Program ini adalah bagian perencanaan harus terlibat total dalam setiap program yang di-review. Sehingga, dalam persiapan program tahun berikutnya dapat lebih baik lagi dan bisa mengakomodir masukan dalam Review Program.”

### Pengampu Program Kalurahan Guwosari

---

“Review Program merupakan program baru yang perlu ditumbuhkembangkan sebagai langkah perwujudan reformasi birokrasi khususnya di pemerintah Kalurahan. Serta sebagai motivasi kepada warga masyarakat di tingkat dusun bahkan RT.”

### Pengampu Program Kalurahan Sriharjo

---

“Kegiatan ini sangatlah baik sebagai masukan langsung kepada pengampu kegiatan apakah tujuan yang diharapkan dalam suatu kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan berdampak positif bagi penerima manfaat. Apabila suatu kegiatan masih mungkin ada kekurangan dan kesalahan, maka dengan adanya review ini dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan pemanfaatannya.”

### Pengampu Program Kabupaten Bantul

---

“Menurut saya, melalui inilah kami sebagai warga masyarakat bisa tahu bagaimana kinerja pemerintah desa. Maju terus! Semoga ke depan semakin terbuka dan transparan kinerja aparat desa.”

### Warga Penilai kalurahan Sriharjo

---

“Perlu dilakukan review dalam setiap program sehingga warga mengetahui seberapa jauh program itu berjalan dan seberapa besar manfaatnya bagi warga.”

### Warga Penilai Kalurahan Guwosari

---

“Dengan adanya Review Program, program pemerintah dapat diukur realisasinya secara langsung. Masyarakat bisa mengetahui anggaran dan *output*-nya.”

### Warga Penilai Kabupaten Bantul

## 7.3 Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAMUSKAL	Badan Permusyawaratan Kalurahan
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPKPAD	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMKal	Badan Usaha Milik Kalurahan
DPT	Daftar Pemilih Tetap
Kaur	Kepala Urusan
LIP	Lembar Informasi Program
LEP	Lembar Evaluasi Program
Musrembang	Musyawaharah Rencana Pembangunan
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RT	Rukun Tetangga
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
TPK	Tim Pelaksana Kegiatan
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
PUSTRAL UGM	Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada



Untuk mengakses form-form dan materi terkait Review Program, silahkan untuk memindai kode QR berikut

